



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, Februari 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini dapat kami selesaikan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang telah disinergiskan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara lebih baik.

Samarinda, Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



YUDHA PRANOTO, SE

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19640817 201006 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dasar Pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No,mor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam revisi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Hasil Capaian Kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing sasaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I			
Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Pergerakan Sarana Transportasi Darat,Laut dan Udara	35%	35.11%	100.31%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	85%	99.86%	117.48%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Kepuasan Masyarakat(Angka)	100	82.04	82.04%

Dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis I dicapai sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi penduduk di Kalimantan Timur secara signifikan mempengaruhi tingginya angka kebutuhan masyarakat pada sektor transportasi sehingga pergerakan pada sektor transportasi mulai mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk capaian Sasaran Strategis II dicapai sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Tahun 2018-2023, hal tersebut perlu ada komitmen pimpinan dalam mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja untuk ke depannya. Kemudian untuk capaian Sasaran Strategis III dicapai sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 belum mencapai target, namun akan diusahakan pada tahun berikutnya agar target dapat tercapai.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Sumber Daya Manusia	6
1.5. Aspek Strategis Organisasi	13
1.6. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	16
1.7. Sarana dan Prasarana Kerja	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
2.1. Pencanaan Strategis	24
2.2. Indikator Kinerja Utama Dishub Prov Kaltim.....	35
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya 2023	42
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	48
3.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	50
3.4. Realisasi Anggaran	74
BAB IV PENUTUP	76
4.1. Kesimpulan	76
4.2. Saran	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah yang dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah. Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2010 dan Perda No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim.

1.2 Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Sesuai dengan Pergub No. 63 Tahun 2016 Dinas Perhubungan mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pergub No. 63 Tahun 2016 pasal 249, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perhubungan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pelayaran;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, sebagai berikut:

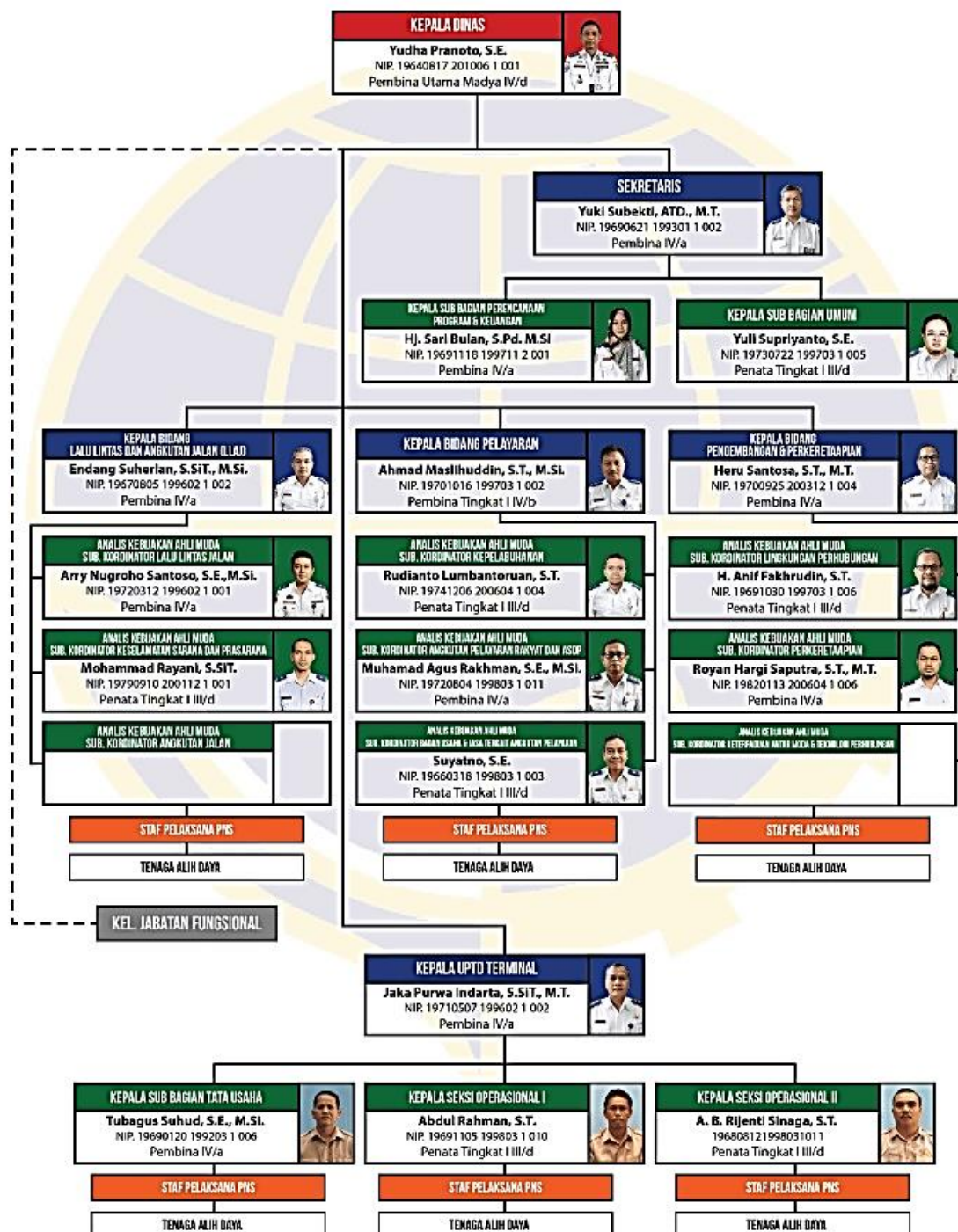
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, Sekretaris memimpin Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memimpin Sub Bidang Koordinator Lalu Lintas Jalan, Sub Bidang Koordinator Keselamatan Sarana dan Prasarana dan Sub Bidang Angkutan Jalan;
4. Bidang Pelayaran, Kepala Bidang Pelayaran memimpin Sub Bidang Koordinator Kepelabuhanan, Sub Bidang Koordinator Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP dan Sub Bidang Koordinator Badan Usaha & Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
5. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian, Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian memimpin Sub Bidang Koordinator Lingkungan Perhubungan, Sub Bagian Perkeretaapian dan Sub Bidang Koordinator Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan;
6. Kepala UPTD;
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
8. Kepala Seksi Operasional I;
9. Kepala Seksi Operasional II.

Pada Tahun 2022 terjadi penyetaraan Jabatan Pengawas menjadi Jabatan Fungsional, Penyetaraan tersebut berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan

Fungsional. Sehingga seluruh Jabatan Pengawas Bidang disetarakan di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur terkecuali Sekretariat yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2023



Sumber: Dishub Prov. Kaltim Tahun 2023

1.4 Sumber Daya Manusia

ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ASN yang handal, memiliki kemampuan berpikir secara rasional dan logis, mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, serta meningkatkan kualitas kinerja individu.

Komposisi pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rekapitulasi Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN				PENDIDIKAN					
	L	P	IV	III	II	I	PASCA SARJANA	SARJANA	D-III	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1		1					1				
Sekretaris	1		1				1					
Kepala Bidang LLAJ	1		1				1					
Kepala Bidang Pelayaran	1		1				1					
Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian	1		1				1					
Kepala UPTD Terminal	1		1				1					
Kepala Subbag Umum	1			1				1				
Kepala Subbag Perencanaan Program dan Keuangan		1	1				1					

Kasubbag Tata Usaha Terminal	1		1				1					
Kasi Operasional I Terminal	1			1				1				
Kasi Operasional II Terminal	1			1				1				
Pengelola Terminal	26	3	2	12	14	1	2	5	1	19	2	
Jlh PNS	61	18	11	43	24	1	14	21	3	38	3	
Jlh Honor/PTT	30	31	-	-	-	-	2	31	3	25		
Jlh PNS +Honor/PTT	91	49	-	-	-	-	16	52	6	63	3	

Sumber: Sub Bag Umum Sekretariat Dishub Kaltim Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan Prov Kaltim memiliki jumlah Sumber Daya Aparatur sebanyak 79 orang Pegawai Negeri Sipil dan 61 orang Pegawai Tidak Tetap (Outsourcing).

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	
		L	P
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	SLTP	3	-
3	SLTA	34	4
4	Sarjana Muda (D-III)	1	2
5	Sarjana (S1/D-IV)	14	7
6	Pasca Sarjana (S-2)	11	3
7	Doktor (S-3)	-	-
	Jumlah	63	16
	TOTAL	79	

Sumber: Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2023

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH	
		L	P
1	I/a Juru Muda	-	-
2	I/b Juru Muda Tk. I	-	-
3	I/c Juru	-	-
4	I/d Juru Tk. I	1	-
5	II/a Pengatur Muda	1	-
6	II/b Pengatur Muda Tk. I	1	-
7	II/c Pengatur	6	-
8	II/d Pengatur Tk. I	14	2
9	III/a Penata Muda	7	1
10	III/b Penata Muda Tk. I	6	6
11	III/c Penata	3	2
12	III/d Penata Tk. I	12	6
13	IV/a Pembina	6	1
14	IV/b Pembina Tk. I	3	-
15	IV/c Pembina Utama Muda	-	-
16	IV/d Pembina Utama Madya	1	-
	Jumlah	61	18
	TOTAL	79	

Sumber: Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2023

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

NO	STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JUMLAH	
		L	P
1	Eselon II	1	-
2	Eselon III	5	-
3	Eselon IV	1	1
	Jumlah	7	1
	TOTAL	8	

Sumber: Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2023

Tabel 1.5
Komposisi Tenaga Kontrak Tahun 2020

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	
		L	P
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	14	11
4	D-III	1	2
5	S-1	15	16
6	S-2	-	2
	Jumlah	30	31
	TOTAL	61	

Sumber: Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2023

Tabel 1.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan

NO	STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JUMLAH	
		L	P
1	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	1	-
2	Sekretaris	1	-
a	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan	-	1
b	Sub Bagian Umum	1	-
3	Kepala Bidang Perhubungan LLAJ	1	-
4	Kepala Bidang Pelayaran	1	-
5	Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian	1	-
6	Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	29	14
Jumlah Keseluruhan Pegawai Dinas Perhubungan Prov. Kaltim		35	15
TOTAL		50	

1	Kepala UPTD Terminal	1	-
a	Sub Bagian Tata Usaha	1	-
b	Seksi Operasional I	1	-
c	Seksi Operasional II	1	-
2	Pegawai UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim	22	3
Jumlah Keseluruhan Pegawai UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim		26	3
TOTAL		29	

Sumber: Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2023

1.5 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, Dinas perhubungan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan pada hakekatnya memiliki tugas dalam membantu Gubernur Kalimantan Timur untuk melaksanakan pencapaian visi misinya terutama pada bidang kebutuhan infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan sarana transportasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Prov Kaltim memiliki peran penting dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam tujuan meningkatkan aksesibilitas wilayah terutama pada aspek transportasi di Kalimantan Timur.

Dinas Perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan jasa pelayanan transportasi yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. Sedangkan unsur pelaksana pemerintah di bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang perhubungan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, Dinas Perhubungan, secara umum memiliki fungsi strategis dalam pembangunan Kalimantan Timur sesuai dengan tujuan startegis Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Meningkatnya Aksesibilitas wilayah” yang ditunjang dengan arah kebijakan berupa :

1. Meningkatkan infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman;
2. Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat

Dimana hal tersebut diatas di implementasikan dalam program prioritas :

1. Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan

Selanjutnya Dinas Perhubungan Prov Kaltim melakukan identifikasi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Teknik identifikasi menggunakan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Dalam lingkungan internal identifikasi dalam bentuk Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) yang merupakan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas. Sedangkan dari lingkungan eksternal diidentifikasi dalam bentuk Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang merupakan dorongan dan hambatan kinerja dengan hasil sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Adanya kewenangan pengelolaan sektor perhubungan di daerah;
- b. Adanya dukungan dari berbagai stakeholders transportasi baik instansi vertikal maupun di daerah serta organisasi profesi;
- c. Adanya potensi sumber daya alam serta deregulasi perundang-undangan yang memberikan peluang kepada daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk turut berkiprah dalam dunia transportasi.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas memerlukan peningkatan pengawasan dan pengelolaan yang profesional;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya sarana dan prasarana sehingga belum tergalinya potensi pengelolaan bidang tugas seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan global;
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Adanya peluang peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur;
- b. Terdapat minat penanaman modal di daerah yang berhubungan erat dengan dunia usaha transportasi;
- c. Adanya kebijakan Pemerintah dalam penataan dan pengembangan wilayah.

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Rendahnya ketertarikan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
- b. Masih rendahnya kedisiplinan dan pemahaman masyarakat pelaku transportasi.

Dengan menggunakan metode SWOT faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada dikelompokkan kedalam 4 strategi yaitu :

- 1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman/kendala
3. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Dari strategi tersebut diambil faktor-faktor kunci sebagai berikut :

1. Pemberdayaan, peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber dana secara optimal;
3. Sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan di bidang transportasi;
4. Penegakan hukum secara konsisten (taat azas);
5. Peningkatan, koordinasi antar/inter instansi;
6. Peningkatan mutu pelayanan.

1.6 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya . Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi yang akan mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Adapun Permasalahan yang ada pada Bidang-bidang dan UPTD di Dinas Perhubungan Prov Kaltim adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Perhubungan LLAJ, antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan,

RPPJ, lampu penerangan jalan dan lain-lain data menunjukkan angka kecelakaan cukup tinggi namun tingkat fatalitas menurun;

2. Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang over dimensi dan *over loading* (ODOL) di jalan;
4. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang LLAJ dan bersertifikat PPNS LLAJ;
5. Belum tersedianya Rencana Induk Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Belum optimalnya pelaksanaan program Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Provinsi (Analisa Dampak Lalu Lintas);
7. Belum optimalnya penggunaan angkutan umum;
8. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum AKDP.

2. Permasalahan Bidang Pelayaran

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Pelayaran, antara lain :

1. Masih adanya pemahaman yang berbeda antara PP No. 38 Tahun 2007 dengan KM Perhubungan No. 58 Tahun 2007 terhadap penanganan kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan
2. Belum tersusunnya Dokumen Studi Lingkungan di beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
3. Belum tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) di beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
4. Belum terciptanya pelaporan angkutan laut secara periodik dan berjenjang

5. Belum tersusunnya dokumen administrasi (izin lokasi, izin pembangunan dan izin operasional) terhadap beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
6. Perlunya rasionalisasi luasan DLKR dan DLKP untuk beberapa pelabuhan laut di Kalimantan Timur
7. Belum tersedianya database secara akurat terhadap keberadaan pelabuhan laut di Kalimantan Timur
8. Belum tersedianya database secara akurat terhadap keberadaan Pelabuhan Khusus dan atau dermaga khusus di Kalimantan Timur
9. Beberapa pelabuhan laut belum dikembangkan sesuai dengan masterplan sehingga berakibat kapasitas pelabuhan laut tidak sebanding dengan aktifitas/permintaan jasa angkutan laut
10. Pelayanan pelabuhan masih konvensional
11. Sempit dan dangkalnya alur pelayaran disebabkan pelabuhan berada di sungai
12. Masih minimnya fasilitas keselamatan pelayaran
13. Kondisi keamanan dan tertib di pelabuhan laut belum optimal karena sarana kapal patroli, kapal navigasi dan kapal pandu jumlahnya terbatas dan umurnya relatif tua
14. Belum selesainya pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy di kabupaten Kutai Timur yang merupakan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.

3. Permasalahan Pengembangan dan Perkeretaapian

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian, antara lain :

1. Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi;
2. Belum optimalnya sarana transportasi antar moda;
3. Belum tersedianya dokumen rencana induk untuk terminal type B, dan Pelabuhan/Dermaga sungai, danau dan penyeberangan;

4. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Belum optimalnya ketersediaan dokumen kajian lingkungan untuk Terminal Type B dan Pelabuhan/dermaga SDP di Kaltim;
6. Belum tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota se Kaltim;
7. Belum optimalnya fasilitas Sistem Informasi dan Teknologi Perhubungan;
8. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen sektor perhubungan di Kalimantan Timur.

4. Permasalahan UPTD Terminal

1. Belum tersedianya Rencana Induk Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Belum tersedianya perencanaan terminal terpadu di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Belum tersedianya kajian lingkungan (UKL/UPL) Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kurangnya tenaga ASN yang memiliki kompetensi Teknis tentang pengelolaan terminal;
6. Masih minimnya tenaga ASN di Terminal Type B yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS;
7. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Angkutan antar Terminal Tipe B di Kalimantan Timur;
8. Belum adanya Standar Pelayanan Operasional (SOP) di Terminal Type B;
9. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan penyediaan fasilitas dan operasional di Terminal Type B;

10. Belum adanya regulasi tentang legalitas asset Terminal Type B dari Pemerintah Kab/Kota ke Pememrintah Provinsi.
11. Masih adanya lahan terminal yang dalam penguasaan masyarakat

1.7 Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Khusus prasarana kendaraan dinas/operasional di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7
Komposisi Kendaraan Dinas/Operasional R4 dan R2

NO	JENIS/MERK KENDARAAN	NO. POLISI	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI
A	KENDARAAN Roda 4			
1	Toyota Fortuner 2.7 G	KT 1042 BZ	2021	Baik
2	Toyota Veloz	KT 1396 B	2022	Baik
3	Toyota Fortuner 2.7 G	KT 1716 BZ	2011	Baik
4	Mitsubhisi Expander	KT 1775 B	2022	Baik
5	Toyota Hilux	KT 8486 BZ	2021	Baik
6	Toyota INOVA	KT 1337 BZ	2010	Baik
8	Suzuki Mega Carry Extra / Pick Up	KT 8879 BZ	2012	Rusak Ringan
9	Suzuki AVP SGX	KT 1564 BZ	2010	Baik
10	Isuzu TBR 541 LM 25 Long	KT 2369 BZ	2003	Rusak Ringan
11	Toyota Avanza	KT 1014 BZ	2008	Baik

12	Toyota Avanza	KT 1540 BZ	2008	Baik
13	Toyota Avanza	KT 1015 BC	2005	Baik
14	Toyota Kijang STD	KT 2408 BZ	2001	Rusak Ringan
B	KENDARAAN Roda 2			
1	Sepeda motor/Yamaha 5 LM	KT 5730 B	2002	Baik
2	Sepeda Motor/Honda CB15A1RRF	KT 4759 M	2003	Baik
3	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4699 MZ	2008	Baik
4	Sepeda Motor/HondaGL 160 D	KT 4819 MZ	2009	Baik
5	Sepeda Motor/Honda GLP III	KT 4012 MZ	2004	Baik
6	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3252 M	2011	Baik
7	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3245 M	2011	Baik
8	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3429 MZ	2012	Baik
9	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3430 MZ	2012	Baik
10	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3431 MZ	2012	Baik
11	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5975 B	2020	Baik
12	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 6966 B	2020	Baik
13	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5979 B	2020	Baik
14	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5077 B	2020	Baik
15	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5700 B	2020	Baik
16	Sepeda Motor Honda CRF 150L	KT 5600 B	2020	Baik
17	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2309 B	2021	Baik

18	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2317 B	2021	Baik
19	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2324 B	2021	Baik
20	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2386 B	2021	Baik
21	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2372 B	2021	Baik
22	Sepeda Motor Yamaha XRIDE 125	KT 2284 B	2021	Baik

Sumber: Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2023

Dari Tabel di atas dapat diketahui jumlah kendaraan operasional yang terdapat di Dinas Perhubungan Prov Kaltim berjumlah 14 kendaraan roda empat dan 22 kendaraan roda dua kendaraan dan dalam keadaan baik.

Tabel. 1.8

**Luas Bangunan dan Sarana Prasarana Penunjang Dinas
Perhubungan Prov Kaltim 2021**

NO	URAIAN	LUAS BANGUNAN (M ²)	JUMLAH	LUAS KESELURUHAN (M ²)
1	Bangunan Gedung terdiri;			
	a. Bangunan Induk	2,950	2	5,900
	b. Gedung koperasi	180	1	180
	c. Gedung Dharma Wanita	419	1	419
	d. Musholla	157	1	157
	e. Kantin	32	1	32
	f. Bangunan baru	202	2	404
2	Ruang Rapat		2 Unit	
3	Area Parkir		3 Area	
4	Komputer		97 unit	
5	Telepon		16 Unit	
6	Website		1 Buah	

7	Papan Pengumuman		1 Unit	
8	Videotron		1 Unit	
Luas Bangunan Keseluruhan				7.092 M ²

Sumber: Subbag Umum Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas keseluruhan pada kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim adalah seluas 7.092 M².

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Penetapan Visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga dapat diartikan sebagai gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sektor perhubungan Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun ke depan.

1. VISI

Dengan adanya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mempengaruhi arah kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang

pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2023 adalah :

“BERANI UNTUK KALTIM YANG BERDAULAT ”

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka perlu untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- 1) Berdaulat Salam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas
- 2) Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan
- 3) Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan
- 4) Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
- 5) Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesionalitas dan Berorientasi Pelayanan Publik

Dari Beberapa Misi diatas Dinas Perhubunga Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab dan memiliki fokus sasaran pada misi ke-3 (tiga) yaitu **“Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan”**

3. TUJUAN

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah :

- 1) Meningkatnya Konektivitas dan Pelayanan Infrastruktur Dasar yang Menunjang Perekonomian Berbasis Tata Ruang/Kewilayahan

4. SASARAN

Sasaran penyelenggaraan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan difokuskan pada peningkatan pemerataan fasilitas pelayanan transportasi secara adil, merata dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi sehingga pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2023 dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2019 - 2023, sebagai berikut :

Sasaran 1:

- Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman

Sasaran 2:

- Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat

Sasaran 3:

- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan

5. INDIKATOR KINERJA

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka sasaran sektor perhubungan sesuai RPJMD yaitu:

“Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan” dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Provinsi Sektor Perhubungan Tahun 2019-2023 (RPJMD)

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN LIMA TAHUNAN					TARGET KINERJA AKHIR RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Perhubungan								
1	Jumlah Penumpang yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton)	Penumpang (Orang) dan Barang (Ton)	10.392.536 (orang) dan 325.051.663 (Ton)	10.705.000 (Orang) dan 334.805.000 (Ton)	11.026.150 (Orang) dan 334.850.000 (Ton)	4.500.000 (Orang) dan 307.000.000 (Ton)	6.000.000 (Orang) dan 337.000.000 (Ton)	8.100.000 (Orang) dan 370.000.000 (Ton)	8.100.000 (Orang) dan 370.000.000 (Ton)

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2019 - 2023

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Target Capaian Lima Tahunan yang mendukung Visi dan Misi serta RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Indikator
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

VISI : Berani Untuk Kaltim Yang Berdaulat
MISI : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN AWAL 2018	TARGET KINERJA KEGIATAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	25	30	32	33	34	35	35
2		Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	50	50	60	70	80	85	85
3		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Tabel 2.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dan Indikator Program
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

VISI : Berani Untuk Kaltim Yang Berdaulat

MISI : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	83%	83%	84%	85%	87%	88%	88%
				Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Kab/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	0%	0%	0%	20%	50%	80%	80%
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	846 Kasus	570 Kasus	448 Kasus	512 Kasus	427 Kasus	342 Kasus	342 Kasus

2	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	846 Kasus	570 Kasus	448 Kasus	512 Kasus	427 Kasus	342 Kasus	342 Kasus
3		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Dishub Kaltim 2019-2023

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Program Dan kegiatan
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN				
								2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kab/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASDP	180 Izin	190 Izin	200 Izin	250 Izin	300 Izin
						Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	40 Izin	45 Izin	50 Izin	100 Izin	100 Izin
						Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional	80%	90%	95%	97%	97.50%
						Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau	75%	78%	81%	83%	93.34%

1	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Lintasan/ Trase Kereta Api	0 Penetapan	0 Penetapan	0 Penetapan	1 Penetapan	1 Penetapan
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	1 Perencanaan	2 Perencanaan	2 Perencanaan	5 Perencanaan	4 Perencanaan
							Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani (Orang)	550.000 Orang	600.000 Orang	650.000 Orang	700.000 Orang	750.000 Orang
						Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Kawasan	0 Penetapan	1 Penetapan	1 Penetapan	1 Penetapan	1 Penetapan

2	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	40%	50%	60%	70%	80%
						Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	42.50%	50%	55%	75%	85%
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	24 Izin	24 Izin	24 Izin	24 Izin	24 Izin
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	10 Izin	10 Izin	10 Izin	10 Izin	10 Izin

3	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	72.32%	72.40%	72.70%	75%	75.50%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	30%	32%	35%	38%	40%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	35%	40%	45%	50%	60%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	80%	85%	90%	95%	100%

Sumber Renstra Dishub 2019-2023

2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov Kaltim

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2015)

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET			REALISASI		
								2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	1. Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	Mengukur Persentase Pergerakan Angkutan Darat, Laut dan Udara yang beroperasi di Kalimantan Timur	$f(x) = \frac{\Delta[\sum \text{Sarana Perhubungan Tahun} - (n-1)]}{\sum \text{Sarana Perhubungan Tahun} (n-1)} \times 100\%$	Bidang Pelayaran	Kepala Bidang Pelayaran	33%	34%	35%	20%	33.74%	35.11%
						Bidang Pengembangan	Kepala Bidang Pengembangan						
						UPTD Terminal	Kepala UPTD Terminal						
2.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	2. Persentase Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana LLAJ	%	Mengukur Persentase Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana LLAJ di Kalimantan Timur	$f(x) = \frac{\Delta[\sum \text{Sarana Prasarana LLAJ Tahun} - (n-1)]}{\sum \text{Sarana Prasarana LLAJ Tahun} (n-1)} \times 100\%$	Bidang LLAJ	Kepala Bidang LLAJ	70%	80%	85%	89.49%	98.51%	99.86%
3.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Sarana & Prasarana Transportasi di Kalimantan Timur	$NRR \text{ Tertimbang per unsur} = NRR \text{ per unsur} \times 0,11$	Bidang Sekretariat	Sekretaris Dishub Prov. Kaltim	100	100	100	95.52	95.75	81.76

Sumber: Renstra Dishub 2019-2023

2.3 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 telah ditetapkan target per tahun pencapaian kinerja hingga lima tahun ke depan.

2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan/tahun anggaran. Adapun Revisi Perjanjian Kinerja di Tahun 2023 pada Perangkat daerah Dinas Perhubungan Prov Kaltim adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

	<p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERHUBUNGAN</p> <p><small>Jl. Kesuma Bangsa No. 01 ☎ : Kadis (0541) 737264, TU (0541) 737267, 738992, 203833 Fax. (0541) 207033 SAMARINDA</small></p>
<p>REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
Nama	: Yudha Pranoto, SE
Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
<p>Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p>	
Nama	: Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Jabatan	: Pj. Gubernur Kalimantan Timur
<p>Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p>	
<p>PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.</p>	
<p>Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p>Samarinda, November 2023</p>	
<p>Pihak Kedua, Pj. Gubernur Kalimantan Timur</p>  <p>Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si</p>	<p>Pihak Pertama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur</p>  <p>YUDHA PRANOTO, SE Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19640817 201006 1 001</p>

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	35
2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	85
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dishub 2023

1. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Prov Kaltim melaksanakan kegiatan dengan Anggaran Murni Sebesar **Rp. 84.533.480.370,-**

2. Target Belanja Dinas Perhubungan

Tabel 2.8
Target Belanja Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2023

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023		
		ANGGARAN BELANJA (RP.)	REALISASI BELANJA (RP.)	%
1	Pagu	Rp. 90.748.130.362,-	Rp. 83.938.119.350	92.50%

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2023

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	Rp. 36.318.277.400	Rp. 31.548.482.982	86,89%

2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Rp. 15.549.174.640	Rp. 15.106.434.679	97,15%
3	Meningkatnya Indeks Keputusan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	Rp. 38.880.678.322	Rp. 37.283.201.689	95,90%

Sumber: Sub Bagian Prencanaan Program dan Keu Dishub 2023

Tabel 2.10
Pagu Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Dinas Perhubungan Prov. Kaltim			
1	Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	34,314,093,319	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	16,328,247,140	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	5,733,228,500	APBD
4	Program Pengelolaan Perkeretaapiaan	1,409,428,700	APBD
UPTD Terminal			
5	Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	4,566,585,003	APBD
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	28,396,547,700	APBD
Jumlah Anggaran APBD		90,748,130,362	APBD

Sumber : DPA Dishub Prov Kaltim Tahun 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa Pagu Anggaran Belanja langsung Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 90.748.130.362,-**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Sebelumnya (2022)

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun 2022

TABEL 3.1

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP

NO.	KOMPONAN YANG NILAI	BOBOT	NILAI 2021	NILAI 2022	PENINGKATAN/ PENURUNAN CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30%	23.83	21.60	-2.23
2	Pengukuran Kinerja	25%	16.88	14.80	-2.08
3	Pelaporan Kinerja	15%	10.97	7.10	-3.87
4	Evaluasi Kinerja	10%	5.85	12.60	6.75
5	Capaian Kinerja	20%	12.58	13.60	1.02
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	70.11	69.70	-0.41
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			Sangat Baik	Baik	

Sumber: laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2022

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa penilaian Implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 69.70 dengan predikat Kategori “B” dengan Interpretasi (Baik).

2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kaltim Terhadap Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Hasil tindak lanjut Evaluasi Inspektorat Provinsi Kaltim menyajikan rekomendasi tindak lanjut dan rencana aksi atas implementasi Sistem AKIP sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3.2
Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT/ RENCANA AKSI	SUDAH/BELUM
I	PERENCANAAN KINERJA:		
1.	Target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja seharusnya dapat dicapai (<i>achievable</i>), realistis dan menantang.	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Renstra pada Dinas Perhubungan Prov Kaltim telah dilakukan monitoring pencapaiannya. - Penyesuaian target telah dilakukan bersamaan dengan Renstra Perubahan. - Perubahan indikator dan target secara mendasar dilakukan pada Renstra 2024-2026. 	Sudah; Perubahan sejalan dengan Perubahan RPJMD.
2.	Perbaikan/Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya berupa dokumen/catatan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian Renstra telah dilaksanakan monitoring secara berjenjang per Triwulan untuk laporan capaian atau realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung sesuai dengan rekomendasi secara elektronik pada aplikasi https://evdoren.kaltimprov.go.id/ - Perubahan indikator dan target secara mendasar dilakukan pada Renstra 2024-2026 	Sudah; Perubahan sejalan dengan Perubahan RPJMD.

3.	Perbaikan/Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik berupa dokumen/catatan yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis capaian hasil kinerja berserta rekomendasi perbaikan dan penyelarasan dokumen perencanaan telah dibuat. - Perubahan indikator dan target secara mendasar dilakukan pada Renstra 2024-2026 	Sudah; Hasil capaian pada tren yang positif sesuai target perubahan.
----	--	---	---

II	PENGUKURAN KINERJA :		
1.	Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala dan setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	Evaluasi target kinerja secara berjenjang setiap level organisasi dimonitor secara rutin dan dituangkan dalam dokumen capaian atas rencana aksi Dinas Perhubungan Prov Kaltim dikumpul secara berkala per triwulan kepada Biro Organisasi melalui aplikasi E-SAKIP.	Sudah
2.	Pengukuran Kinerja menjadi dasar pemberian <i>Reward and Punishment</i> serta penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional	Hasil pengukuran kinerja berjenjang telah dimanfaatkan sebagai dasar reward dan punishment internal Dishub Prov Kaltim Evaluasi pimpinan terhadap hasil capaian kerja pegawai dari level Esepon III, IV dan Pelaksana.	Sudah ; Untuk penempatan/penghapusan jabatan struktural maupun fungsional belum dapat diimplementasikan

3.	Pengukuran Kinerja dijadikan dasar pengusulan penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi.	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar refocusing organisasi selaras dengan terbitnya Pergub Kaltim No. 43 Tahun 2023 tentang SOTK.	Sudah
4.	Pengukuran kinerja dijadikan dasar untuk penyesuaian strategi/langkah-langkah dalam capaian kinerja.	<p>Dokumen capaian atas rencana aksi dan dokumen monitoring evaluasi pembangunan program prioritas menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja</p> <p>1. Dokumen hasil capaian atas rencana aksi Per triwulan</p> <p>2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan per semester</p>	Sudah

III	PELAPORAN KINERJA :		
1.	Menjadi perhatian utama pimpinan.	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja berasal dari pengumpulan data dari masing-masing penanggung jawab program/kegiatan yang dapat ditelusuri dan terverifikasi - Setiap penanggung jawab program dan kegiatan akan dimintai data dan informasi setiap per triwulan untuk 	Sudah

		<p>diketahui sejauh mana kegiatan itu berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dan informasi dilaporkan ke pimpinan untuk dievaluasi dalam rapim dan ditindaklanjuti dengan arahan dari pimpinan. 	
2.	<p>Digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan dapat mempengaruhi budaya kerja organisasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang disajikan (dokumen) telah digunakan untuk meningkatkan realisasi program dan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim - Dokumen Capaian realisasi berjenjang menjadi dasar acuan untuk peningkatan program dan kegiatan berjalan 	Sudah

IV	EVALUASI INTERNAL :		
1.	<p>Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, meningkatkan nilai implementasi SAKIP atas semua komponen penilaian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring secara berjenjang dari pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana. - Hasil capaian realisasi tertuang dalam dokumen capaian realisasi setiap pertriwulan - Monitoring secara berjenjang dengan melaporkan hasil 	Sudah

		capaian kinerja sesuai targetnya untuk dilakukan pengukuran capaian.	
2.	Mengimplementasikan hasil tindak lanjut evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja (perencanaan selanjutnya).	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana aksi telah terpantau sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan - Dokumen evaluasi rencana aksi menjadi acuan dalam perbaikan peningkatan capaian program/kegiatan - Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata. - Memilah setiap program kegiatan dengan indikator kinerja utama dimana setiap program kegiatan harus memiliki data bukti kerja seperti dokumentasi, laporan kerja bulanan sampai dengan hasil akhir capaian kerja. - Perubahan indikator dan target secara mendasar dilakukan pada Renstra 2024-2026 	Sudah
3.	Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan dalam efektivitas dan efisiensi kinerja, memperbaiki dan	Perubahan indikator dan target secara mendasar dilakukan pada Renstra 2024-2026 beserta penyesuaian anggaran setiap sub kegiatan yang	Sudah

	meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	mendukung langsung pada pencapaian target indikator secara berjenjang.	
--	---	--	--

Sumber: Subbag. Perencanaan program dan keuangan 2023

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa rekomendasi terhadap permasalahan yang ada telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Prov Kaltim sehingga untuk kedepannya diharapkan dapat meningkatkan hasil kinerja yang lebih baik dari Tahun sebelumnya.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Adapun target dan capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam tabel di bawah ini;

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	Mengukur Prosentase Pergerakan Sarana Transportasi Darat, Laut dan Udara	%	35%	Triwulan I	8.75%	8.51%	97.21%
					Triwulan II	8.75%	9.68%	110.67 %
					Triwulan III	8.75%	10.08%	115.25 %
					Triwulan IV	8.75%	6.83%	78.10%
2.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan	%	85%	Triwulan I	0%	0%	0%
					Triwulan II	0%	0%	0%
					Triwulan III	42.5%	79%	185.88 %
					Triwulan IV	42.5%	20.88%	49.13%

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi atas capaian sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 mencapai target yang telah telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis 2018-2023.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan Gubernur Kalimantan Timur dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman:

Indikator sasaran Strategis 1 (satu):

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi capaian:

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1.	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	35	35.11	100.31%

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2023

Dapat tercapainya realisasi pada tahun 2023 dikarenakan adanya kerjasama yang baik dengan *stakeholder* terkait dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan serta perolehan data pergerakan sarana transportasi, bahkan realisasi sasaran 1 melebihi target sasaran strategis 1.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023:

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Sasaran Strategis maka diperlukan pembandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2022 dan 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		% PENINGKATAN / PENURUNAN TAHUN 2023
			2022	2023	
1	2	3	4	5	$6 = ((5/4) - 1) * 100$
1.	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	33,74%	35,11%	4,06%

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2023

Persentase Pergerakan Sarana Transportasi tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 4,06%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPJMD:

Tabel 3.6

Realisasi Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Akhir Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (TH. 2023)	REALISASI (TH. 2023)	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 * 100$
1.	Persentase Pergerakan Sarana Transportasi	%	35%	35,11%	100,31 %

Sumber: Dinas Perhubungan Prov kaltim 2023

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis 1 Pada Tahun 2023 mencapai 35,11% terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 mengalami tingkat kemajuan sebesar 100/31 %.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :

1. Sasaran Strategis I (Indikator : Persentase Pergerakan sarana Transportasi)

Analisis Keberhasilan & Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis 1

Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat oleh karenanya kesinambungan ketersediaan pelayanan jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi harus mendapat perhatian secara berkelanjutan. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur secara signifikan dapat mempengaruhi tingginya angka kebutuhan masyarakat pada sektor transportasi, karena salah satu fungsi strategis transportasi adalah menciptakan stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda pemerintahan di Kalimantan Timur, adapun jumlah pergerakan kendaraan (transportasi) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Jumlah Pergerakan Kendaraan Tahun 2023

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH PERGERAKAN
1	Terminal Tipe A	35.717
2	Terminal Tipe B	41.484
3	Angkutan Udara	61.506
4	Angkutan Laut / KSOP & KUPP	143.885
5	Angkutan Penyeberangan Kariangau dan Penajam	63.572
6	Angkutan Sungai	797
7	Angkutan Darat (tidak melalui terminal)	30.753
	Jumlah	377.714

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2023

Jumlah pergerakan transportasi di Kalimantan Timur Tahun 2023 berjumlah 377.714 kendaraan, capaian tersebut mengalami peningkatan jumlah pergerakan transportasi dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 (369.984).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Capaian Sasaran Strategis I (Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman) adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan fasilitas Pelabuhan/Dermaga.

Potensi industri maritim di Kaltim memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat pada sektor perikanan, pertanian dan sektor pariwisata. Dengan potensi yang dimiliki Kaltim saat ini harus didukung dengan sistem transportasi yang handal seperti peningkatan infrastruktur transportasi laut, pembangunan dan pemeliharaan kapal pelabuhan barang, pembangunan tol laut guna penyerataan harga komoditas, menghilangkan pungli di pelabuhan, serta konektivitas sistem transportasi. Tahun 2021 upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam peningkatan infrastruktur pelabuhan, dermaga dan penyeberangan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Jalan Penghubung Causeway Pelabuhan Laut Maloy
- Perbaikan Jalan Akses Masuk dan Keluar Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan
- Pembinaan Badan usaha
- Pemeriksaan Keselamatan Pelayaran
- Sosialisasi dan Forum Keselamatan Pelayaran

- **Alternatif Solusi/ Upaya Dalam Meningkatkan Persentase Pergerakan sarana Transportasi**

1. Upaya dalam mempertahankan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima pada sektor transportasi diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif;
2. Peningkatan kualitas atau pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan dan keselamatan pengguna sarana transportasi pada terminal, pelabuhan, dermaga, dan bandar udara (WC Umum yang terpisah antara pria dan wanita maupun penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang, kantin, tempat ibadah, tempat menyusui serta tempat-tempat lain yang memiliki unsur penunjang dalam pelaksanaan pelayanan transportasi umum);
3. Melakukan pengintegrasian antar *stakeholder* perhubungan terkait dengan monitoring pergerakan Sarana Transportasi secara berkala (Pemantauan Lalu Lintas Harian) sebagai upaya monitoring dan evaluasi dalam untuk meningkatkan ekonomi Kaltim;
4. Pemberlakuan dan sosialisasi yang rutin tentang Protokol Kesehatan yang ketat di semua sektor transportasi.

5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1
(Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan
Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGUNG JAWAB	KET.
1	Program Pengelolaan Pelayaran		Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	%	88	87	98%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Penyelenggaraan ASD	Izin	300	139	46%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Studi Pengembangan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	Dokumen	1	1	100%	Kabid Pelayaran	APBD
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Jasa Pelayaran	Izin	100	100	100%	Kabid Pelayaran	APBD
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan Fasilitas/Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Regional	%	97.5	97.5	100%	Kabid Pelayaran	APBD
2	Program Pengelolaan Perkeretaapian		Prosentase Kabupaten/Kota yang Tersosialisasikan Perencanaan, Peraturan dan Kebijakan Perkeretaapian	%	80	80	100%	Kabid Pengembangan & Perkeretaapian	APBD
		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	1	1	100%	Kabid Pengembangan & Perkeretaapian	APBD
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Jumlah Lakalantas	Kasus	342	126	37%	Kabid LLAJ	APBD
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Penumpang Terminal yang Terlayani	Orang	750000	337020	45%	Kepala UPTD Terminal	APBD
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	Perencanaan	1	1	100%	Kabid Pengembangan & Perkeretaapian	APBD

Sumber: Dinas Perhubungan Kaltim 2023

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 1 Dinas perhubungan memiliki 3 (tiga) Program strategis yaitu sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pelayaran :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan;
2. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas ;
4. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

b. Program Pengelolaan Perkeretaapian :

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian.

c. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (UPTD Terminal);
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Dishub);

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	99,24	91,66	7,58

Sumber: Olah data 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini memiliki nilai 7,58%.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat

Indikator sasaran Strategis 2 (dua):

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi capaian:

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	Persentase (%)	85	99,86	117.48

Sumber: Dinas Perhubungan Prov kaltim 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa hasil dari pengukuran capaian sasaran strategis II memiliki realisasi 123,14% dimana hasil tersebut melebihi hasil dari target yang telah ditentukan dalam dokumen rencana strategis Tahun 2018-2023.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023:

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan pembandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja
Serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2022 dan 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		% PENINGKATAN / PENURUNAN TAHUN 2021
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6=((5/4)-1)*100
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	%	98,51%	99,86%	1.37%

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil capaian sasaran 2 (Pertumbuhan kelaikan sarana prasarana lalu lintas jalan) jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya memiliki hasil peningkatan 1.37%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPJMD:

Tabel 3.12
Realisasi Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Akhir Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (TH. 2023)	REALISASI (TH. 2022)	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
1.	Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	%	85%	99,86%	117.48%

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2023

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis 2 memiliki hasil capaian realisasi tingkat kemajuan sebesar 117.48% dari target 85%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Sasaran Strategis 2 (Indikator : Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan)

- Analisis Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis 2**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat).

1. Hasil Inspeksi Keselamatan Kendaraan Bermotor/Rampcheck (Angkutan Orang dan Barang).

Tabel 3.13
Tabel Hasil Rampchek Kendaraan Bermotor Tahun 2023

Kendaraan yang Diperiksa	Tahun		
	Awal 2022	2023	Akhir RPJMD
Angkutan Umum	102	943	250
Angkutan Barang	357	80	400
Jumlah	459	1023	650
Persentase		157.38%	

Sumber: Bidang LLAJ Dishub Kaltim Tahun 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah kendaraan yang telah dilakukan rampchek (pemeriksaan kelaikan) berjumlah 943 kendaraan jenis angkutan umum dan 80 kendaraan jenis angkutan barang. Diketahui total hasil kendaraan yang telah di rampcheck pada Tahun 2023 berjumlah 1023 kendaraan dan bila disandingkan dengan target akhir tahun (RPJMD) mendapat persentase sebesar 157.38%.

2. Jumlah Prasarana Keselamatan Jalan yang Terpasang Pada Ruas Jalan Provinsi

Salah satu indikator penunjang keberhasilan capaian sasaran strategis 2 adalah kegiatan pemasangan prasarana keselamatan jalan di ruas jalan provinsi, adapun jumlah prasarana keselaan jalan yang terpasang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Jumlah Prasarana Yang Terpasang Pada Tahun 2023

Jenis Prasarana	Tahun			
	Awal 2022	2023	Jumlah Terpasang Data Awal + 2023	Akhir RPJMD (2023)
Rambu	5.985	654	6.639	16.000
Marka	341.643	6202	347.845	2.237.725
Pagar	5.628	86	5.714	89.509
LPJU	97	91	188	235
Persentase	25.06%	100%	30%	100%

Sumber: Bidang LLAJ Dishub Kaltim Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa prasarana keselamatan jalan yang terpasang Pada Tahun 2023 untuk rambu berjumlah 654 unit, Marka jalan 6.202 m² dan LPJU 188 unit. Sehingga jika disandingkan dengan target capaian hasil tahun terakhir RPJMD (Tahun 2023) mencapai 30%. 360386 2343469

3. Prasarana Kelengkapan Terminal Tipe B (Indikator Penilaian WTN)

Kab/Kota berpredikat WTN (Wahana Tata Nugraha), merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja sistem transportasi di wilayah Kab/Kota, salah satu penilaian WTN adalah penilaian terkait dengan prasarana kelengkapan pada Terminal Tipe B yang ada di Kalimantan Timur, adapun penilaiannya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Angka Penilaian WTN pada Terminal Tipe B

PRASARANA TERMINAL	TAHUN
	2022
Batu Ampar	83
Sungai Kunjang	83
Lempake	83
Timbau	77
Penajam	62
Paser	58
Bontang	62
Sangatta	45
Berau	68
Persentase	69%

Sumber: Bidang LLAJ Dishub Prov. Kaltim 2023

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa angka penilaian Wahana Tata Nugraha khusus pada kelengkapan prasarana terminal memiliki capaian rata-rata 69 %. Pada Tahun 2023, Kementerian Perhubungan tidak mengadakan penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) tingkat nasional pada tahun 2023.

3. Penurunan Jumlah Angka Kecelakaan

Tabel 3.16
Angka Kasus Kecelakaan

NO	KESATUAN	JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Polresta Samarinda	120	225	170	109	96	87	78
2	Polres Balikpapan	140	179	132	88	47	56	26
3	Polres Bontang	38	76	92	55	56	31	20
4	Polres Kukar	145	296	152	40	77	78	28
5	Polres Kutim	90	59	50	34	23	19	6
6	Polres Kubar	30	55	48	103	22	29	9
7	Polres Berau	48	46	85	100	27	55	9
8	Polres Paser	59	56	149	80	71	41	0
9	Polres PPU	43	40	69	44	43	31	19
	JUMLAH	736	705	1.193	868	570	448	195

Sumber: Data Polda Kaltim 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir, rata-rata angka kasus laka lintas di semua Kab/Kota mengalami penurunan.

- **Alternatif Solusi / Upaya Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan**

1. Mengkaji kembali jumlah kebutuhan sarana prasarana keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi dan lokasi rawan kecelakaan sesuai dengan kebutuhan, guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas;
2. Meningkatkan kembali kegiatan inspeksi keselamatan angkutan umum dan angkutan barang secara rutin dan berjenjang, guna mengurangi tingkat pelanggaran over dimensi dan overloading dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten;

3. Peningkatan nilai capaian Wahana Tata Nugraha melalui :
 - a) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan nilai capaian WTN;
 - b) Mengkaji kembali kebutuhan sarana prasarana kelaikan transportasi darat.
5. **Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 2
(Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGUNG JAWAB	KET.
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Jumlah Lakalantas	Kasus	342	126	37%	Kabid LLAJ	APBD
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Perlengkapan Jalan	%	80	80	100%	Kabid LLAJ	APBD
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading	%	75	80.97	108%	Kabid LLAJ	APBD
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah izin andalalin yang di keluarkan	Izin	30	30	100%	Kabid LLAJ	APBD
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	%	85	85	100%	Kabid LLAJ	APBD
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penambahan Jumlah Angkutan Umum dan/atau Barang yang tersedia	Unit	20	21	105%	Kabid LLAJ	APBD
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Angkutan Orang yang dikeluarkan	Izin	75	87	116%	Kabid LLAJ	APBD
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Angkutan Taksi yang Dikeluarkan	Izin	75	89	119%	Kabid LLAJ	APBD

Sumber : Dinas Perhubungan Prov kaltim 2023

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 2 Dinas perhubungan memiliki 1 (satu) Program strategis yaitu sebagai berikut :

d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
3. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi;
4. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
5. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1(Satu) Daerah Provinsi;

6. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
7. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi;

Tabel 3.18
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	117,48	99,86	17.62

Sumber: Olah data Dinas Perhubungan 2023

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan

Indikator sasaran Strategis 3 (tiga):

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi capaian:

Tabel 3.19
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	Angka	100	82.04	82.04

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa hasil dari pengukuran capaian sasaran strategis III memiliki realisasi 82,04%.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Dalam mengukur capaian realisasi Capaian Strategis maka diperlukan pembandingan dengan capaian sebelum-sebelumnya, sehingga dapat terlihat adanya keberhasilan atau tidak berhasilnya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, adapun realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 (tiga) Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja dengan Tahun 2022 dan 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		% PENINGKATAN / PENURUNAN TAHUN 2021
			2022	2023	
1	2	3	4	5	$6 = ((5/4) - 1) * 100$
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	%	85,48%	82.04%	-4.02%

Sumber: Dinas Perhubungan Prov kaltim 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil capaian sasaran 3 (Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) 82.04 jika dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya memiliki hasil penurunan -4.02%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPJMD:

Tabel 3.21
Realisasi Sasaran Strategis 3 Terhadap Target Akhir Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (TH. 2023)	REALISASI (TH. 2023)	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	$6 = (5/4) * 100$
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	Angka	100	82.04	82.04

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2023

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran strategis 3 memiliki hasil capaian realisasi tingkat kemajuan sebesar 82.04 dari target 100.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja :

Sasaran Strategis 3 (Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat)

• Analisis Keberhasilan / Kegagalan Dalam Capaian Sasaran Strategis 3

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Capaian Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan).

1. Hasil Survei Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi dan Survei Kepuasan Masyarakat di sektor Perhubungan

Tabel 3.22
Hasil IKLI dan SKM Pada UPTD Terminal

No.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Transportasi				
	Tahun 2019 (SKM)	Tahun 2020 (SKM)	Tahun 2021 (SKM)	Tahun 2022 (SKM)	Tahun 2023 (SKM)
1.	76.6	79.22	79.68	80.21	79.80

Sumber: IKLI BAPPEDA Tahun 2019 dan SKM Dishub Kaltim 2023

Hasil SKM Tahun 2023

1. Terminal Sungai Kunjang memiliki nilai : 80.29
2. Terminal Lempake memiliki nilai : 79.86
3. Terminal Bontang memiliki nilai : 80.04
4. Terminal Sangatta memiliki nilai : 78.83
5. Terminal Tenggarong memiliki nilai : 78.83
6. Terminal Paser memiliki nilai : 79.71
7. Terminal Berau memiliki nilai : 81.07

Jika secara keseluruhan dirata-ratakan maka Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (UPTD Terminal Tipe B) memiliki Nilai 79.80 **dengan kategori Baik**.

Dari tabel dan capaian SKM di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 masyarakat di Kalimantan Timur melalui tim penyusun dan penilai Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur Kaltim dapat diketahui bahwa pelayanan infrastruktur perhubungan dinilai sangat baik karena mencapai target kerja yaitu 76.6 sedangkan mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 Dinas Perhubungan Prov kaltim menggunakan Sistem Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada 7 (Tujuh) Terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Timur dengan populasi masing-masing 140 orang dan sampel 103 orang responden secara acak (tabel kreji dan Morgan), dari hasil tersebut diolah data yang sehingga mendapatkan nilai 79.80 (B).

2. Hasil Survei Indikator Kepuasan layanan dan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan standar pelayanan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Selain melakukan survei kepuasan masyarakat pada Terminal Tipe B Prov. Kaltim, survei kepuasan masyarakat juga dilakukan di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim (terkait pelayanan), antara lain:

- Layanan izin penyelenggaraan angkutan orang
- Layanan perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan orang
- Layanan perpanjangan kartu pengawasan (KP)
- Layanan peremajaan/penggantian dan penambahan kendaraan
- Layanan penerbitan surat keputusan persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)
- Layanan penerbitan surat izin usaha perusahaan bongkar muat (SIUPBM)
- Layanan penerbitan surat izin usaha jasa pengurusan transportasi (SIUJPT)

- Layanan izin pengoperasian angkutan khusus sungai dan danau
- Layanan izin pengoperasian angkutan penyeberangan
- Layanan kartu pengawasan izin trayek ASDP

Tabel 3.23
Hasil IKLI dan SKM Pada Dinas Perhubungan

NO	INDEKS KEPUASAN LAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALTIM	
	IKM TAHUN 2022	IKM TAHUN 2023
NILAI IKM	95.52	82.04

Sumber: SKM Dishub Kaltim 2023

Untuk mencapai capaian sasaran strategis 3 dinas perhubungan membagi bobot Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 50% untuk IKM UPTD Terminal dan 50% untuk IKM Dinas Perhubungan sehingga diperoleh hasil capaian realisasi tingkat kemajuan sebesar **82.04** dari target 100.

• **Alternatif Solusi / Upaya Dalam Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan atau sarana dan prasarana yang ada di setiap Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Prov. Kaltim seperti Kamar mandi (WC Umum) yang terpisah antara pria dan wanita maupun penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang, kantin, tempat ibadah, tempat menyusui serta tempat-tempat lain yang memiliki unsur penunjang dalam pelaksanaan pelayanan transportasi umum;
2. Perlu adanya peningkatan penyusunan survei kepuasan masyarakat dengan atau bekerja sama dengan pihak lain yang dianggap matang atau lebih berpengalaman agar pengolahan data yang didapat bisa lebih akurat dan lebih matang dengan demikian maka dapat membantu instansi Dinas Perhubungan Prov Kaltim Khususnya UPTD Terminal Tipe B dalam

meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan.

5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai keberhasilan suatu Sasaran Strategis maka diperlukan Program dan Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan agar tercapainya sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang menunjang sasaran 3 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 3
(Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGUNG JAWAB	KET.
Dinas Perhubungan									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	%	100	84.45	84.45%	Sekretaris	APBD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	75.5	73.05	96.75%	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100%	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	40	38	95%	Kasubbag Umum	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	%	60	50	83%	Kasubbag Umum	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Umum	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	100	95	95%	Kasubbag Umum	APBD

D Terminal								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Urusan Bidang Urusan Bidang Perhubungan	%	100	78.49	78.49%	Kepala UPTD Terminal	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Tata Usaha	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang milik Daerah	%	50	50	100%	Kasubbag Tata Usaha	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100%	Kasubbag Tata Usaha	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	30	25	83%	Kasubbag Tata Usaha	APBD

Sumber : Dinas Perhubungan Prov kaltim 2023

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk menunjang sasaran strategis 3 Dinas perhubungan memiliki 1(satu) Program yaitu sebagai berikut:

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6. Capaian Tujuan Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tabel 3.25
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	REALISASI TAHUN 2023
1.	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang /kewilayahan	Jumlah Penumpang Yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton)	6.000.000 Orang dan 337.000.000 Ton	10.049.451 Orang dan 584.823.727 Ton

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2023

Dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja tujuan pada RPJMD Tahun 2018-2023 di Tahun 2023 dapat melebihi Target Indikator Tujuan.

Tabel 3.26
Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal Tipe B

TAHUN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI	PERSENTASE	PAGU APBD	JUMLAH PROGRAM / KEGIATAN YANG DIALOKASIKAN		TOTAL PROGRAM / KEGIATAN		KET.
					PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
2022	Rp 51.039.267.661	Rp 45.774.032.620	89.68%	Rp 51.039.267.661	4	24	4	24	APBD
2023	Rp 90.748.130.362	Rp 83.938.119.350	92.50%	Rp 90.748.130.362	4	25	4	25	APBD

Sumber: Dinas Perhubungan Prov Kaltim 2023

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Penggunaan Anggaran Tahun 2023 memiliki nilai penyerapan sebesar 92.50% sedangkan tahun 2022 penyerapan realisasi anggaran sebesar 89.68%.

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi , Kawasan Industri dan Pusat Pemukiman	35	35.11	100.31	36,318,277,400	31,548,482,982	86.87
2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	85	99.86	117.48	15,549,174,640	15,106,434,679	97.15
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan	100	100	100	38,880,678,322	37,283,201,689	95.89
					90,748,130,362	83,938,119,350	92.50

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2023

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Dinas Perhubungan Prov. Kaltim			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34,314,093,319	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	16,328,247,140	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	5,733,228,500	APBD
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1,409,428,700	APBD
UPTD Terminal			
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,566,585,003	APBD
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	28,396,547,700	APBD
Jumlah Anggaran APBD		90,748,130,362	APBD

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2023

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 yang telah disusun dalam Dokumen LKjIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Ke Lima (2023) memiliki hasil capaian sebagai berikut:

1. Pada sasaran strategis 1 (Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman) dengan indikator kinerja “Persentase Pergerakan Sarana Transportasi” memiliki target sebesar 35% dan memiliki realisasi capaian kerja 35,11% sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 100,31%;
2. Pada sasaran strategis 2 (Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat) dengan indikator kinerja “Pertumbuhan Kelaikan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan” memiliki target sebesar 85% dan memiliki realisasi capaian kerja 99,86% sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 117,48%;
3. Pada sasaran strategis 3 (Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Bidang Perhubungan) dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” memiliki target sebesar 100 dan memiliki realisasi capaian kinerja 82.04 sehingga capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 82.04%.
4. Capaian Indikator Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah Jumlah Penumpang Yang Terlayani (Orang) dan Jumlah Barang (Ton) yaitu 10.049.451 Orang dan 584.823.727 Ton.

4.2 Saran

Dari Analisis Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Prov Kaltim Tahun Anggaran Tahun 2023, diperlukan saran sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel dan bermanfaat diperlukan komitmen pimpinan terhadap sinergitas antara rencana strategis dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dapat terukur dengan baik;
2. Perlu adanya evaluasi secara berjenjang terkait dengan capaian-capaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Prov Kaltim pada Tahun berjalan untuk menunjang capaian RPJMD baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan;
3. Untuk mendapatkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu adanya peningkatan kerjasama antara *stakeholder* yang terkait dalam mendapatkan data yang akan disusun pada dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.